



Mengincar Dapil Wilayah Timur

KOMPAS - 8/3/19 (1)

Memenangi dapil di wilayah timur Indonesia menjadi salah satu strategi lolos ke Senayan. Dapil ini menarik karena tiga indikator: indeks pembangunan manusia, partisipasi pemilih, dan domisili caleg.

HAK PILIH
KPU Coret WNA dengan KTP-el dari DPT

Indeks Pembangunan Manusia, Partisipasi Pemilih, dan Caleg Pendatang

	Skor IPM (2017)	Tingkat Partisipasi	Peringkat Partisipasi	Caleg Pendatang
Kualitas Manusia Tertinggi/Skor IPM Tinggi				
DKI Jakarta II	82,31	66,35%	74	30,3%
DKI Jakarta I	81,61	72,42%	56	44,0%
Jawa Barat VI	80,07	66,57%	73	46,5%
Jawa Timur I	79,89	67,25%	72	41,5%
Jawa Barat I	78,63	75,36%	39	45,0%
Kualitas Manusia Terendah/Skor IPM Rendah				
Papua Barat	61,80	85,26%	3	52,4%
NTT II	62,30	77,15%	30	47,4%
Papua	62,73	95,14%	1	33,8%
NTT I	62,84	83,29%	4	78,3%
Jatim XP	62,85	87,70%	2	54,5%

Sumber: Litbang Kompas/AN/CGR/HDE, ditolah dari KPU dan BPS

Politik	Jakarta II	Papua Barat	Rata-Rata 80 Dapil
Jumlah Kursi DPR	7	3	7
Jumlah Caleg	2.504.291	74.225	2.384.328
Jumlah Pemilih	105	42	100
Rasio Caleg	1:23.850	1:5.997	1:23.891
dan Jumlah Pemilih			
Rasio Jumlah Kursi dan Caleg	1:15	1:14	1:14
Tingkat Partisipasi (2014)	66,19%	85,26%	75,11%
Caleg Wajah Lama Pemilu 2019	15,2%	11,9%	14,8%
Caleg Perempuan Terpilih Pemilu 2014	28,6%	0,0%	17,6%
Pemenang Pemilu 2014	PDI-P (26,7%)	Golkar (28%)	PDI-P (18,9%)
Ekonomi			
PDRB (2016)	Rp 1.018 triliun	Rp 66,49 triliun	Rp 158,66 triliun
Rata-rata pertumbuhan ekonomi (2013-2017)	6,18%	5,69%	5,63%
Angka kemiskinan (2017)	3,46%	28,66%	11,2
IPM (2017)	82,31	61,80	69,8

datang. Sosok pendatang, terutama dari Pulau Jawa, tak jarang dianggap sebagai sosok yang berkualitas lebih baik. Apalagi, jika pendatang itu menyangkut pendidikan yang lebih tinggi, ditambah latar pekerjaan dan kekayaan yang lebih baik dibanding masyarakat lokal. Mereka bisa dianggap membawa harapan baru.

Di ajang kontestasi pemilu, di atas kertas caleg pendatang lebih diuntungkan. Dengan kekuatan modal finansial besar dan kemampuan persuasi, keberadaan mereka bisa menggeser eksistensi caleg lokal yang mungkin lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

Dalam kondisi ini, yang dipertanyakan adalah nasib dan masa depan masyarakat lokal. Akankah caleg pendatang ketika terpilih nanti benar-benar memperjuangkan suara masyarakat yang diwakilinya? Terutama dalam meningkatkan kapabilitas dan kualitas masyarakat lokal melalui perbaikan layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang menjadi indikator IPM.

Atau, justru caleg pendatang ini hanya menjadikan dapil-dapil di bagian timur Indonesia ini sebagai mesin pendulang suara tanpa berjuang meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat lokal? Semuanya berputar kepada pilihan masyarakat pada pemilu serentak nanti.

(GIANIE/LITBANG KOMPAS)

Pengelompokan daerah pemilihan (dapil), berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM), membelah kualitas manusia di dapil-dapil pemilihan legislatif pada Pemilu 2019 menjadi dua kutub berlawanan. Implikasinya terlihat pada perilaku politik, baik dari sisi pemilih maupun calon anggota legislatif.

Satu hal yang bisa disimpulkan, sebagai daerah yang memiliki IPM relatif rendah, tetapi partisipasi pemilihnya tinggi, dapil di Indonesia bagian timur banyak menjadi incaran caleg dari luar dapil itu. Dapil dengan IPM tinggi umumnya adalah dapil yang tergolong maju. Kelima dapil itu adalah DKI Jakarta 2, DKI Jakarta 1, Jawa Barat 6, Jawa Timur 1, dan Jawa Barat 1.

Sebaliknya, dapil dengan IPM rendah cenderung merupakan daerah yang belum berkembang pesat. Lima dapil yang memiliki IPM terendah ada di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu dapil Papua Barat, NTT 2, Papua, dan NTT 1, serta berada di urutan ke lima adalah dapil Jatim II.

IPM mencerminkan kapabilitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Ia mengandung makna dan dampak yang lebih luas pada aspek pembangunan manusia, termasuk dalam dinamika kehidupan politik.

Partisipasi pemilih di DKI Jakarta 2 sebesar 66,35 persen, Jabar 6 sebesar 66,57 persen, dan Jatim 1 sebesar 67,25 persen. Partisipasi pemilih DKI Jakarta 2 berada di peringkat 74 dari 80 dapil. Sementara Jabar 6 di peringkat 73, dan Jatim 1 di peringkat 72.

Sebaliknya, di dapil dengan IPM rendah, tingkat partisipasi pemilihnya cenderung tinggi. Partisipasi pemilih di lima dapil dengan IPM rendah mencapai di atas 77 persen. Bahkan, di dapil Papua, partisipasi pemilihnya 95,15 persen. Disusul dapil Jatim II dengan partisipasi pemilih 87,7 persen. Di dapil Papua Barat, partisipasi pemilih 85,26 persen.

Tingginya partisipasi di Papua ini juga terkait sistem pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken yang sifatnya kolektif. Dalam sistem noken, kepala suku mewakili anggota sukunya baik dalam pilkada maupun pemilu.

Perilaku caleg

Hasil penelusuran data 80 dapil juga memperlihatkan, di dapil dengan angka IPM rendah dan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, caleg di wilayah itu banyak yang berasal dari luar dapil.

Sebagai contoh, di dapil Papua Barat dan Jatim II, jumlah caleg yang domisilinya bukan di dapil tempat ia mencalon-

kan diri mencapai 50 persen. Caleg pendatang di dapil Papua Barat 52,4 persen, sedangkan di dapil Jatim II mencapai 54,5 persen. Caleg pendatang terbanyak di dapil dengan IPM rendah adalah dapil NTT 1 yang mencapai 78,3 persen.

Adapun di dapil dengan IPM tinggi, caleg pendatang jumlahnya lebih sedikit, kurang dari 50 persen. Di dapil DKI Jakarta 2, misalnya, caleg pendatang sebesar 30,3 persen.

Masuk dalam lima besar dapil dengan IPM rendah, dapil Jatim II menjadi dapil yang unik. Dapil ini masih di Pulau Jawa, tetapi buruknya kualitas yang jadi aspek pengukuran IPM menempatkannya hanya

sedikit lebih baik dibandingkan daerah di Indonesia bagian timur. Dapil Jatim II meliputi seluruh daerah di Pulau Madura.

Nilai IPM di dapil Jatim II mencapai 62,85. Partisipasi pemilih di dapil ini tergolong tinggi, yakni 87,7 persen yang menempatkannya di urutan kedua tertinggi dari 80 dapil setelah dapil Papua. Separuh caleg di dapil ini berdomisili di luar Madura (54,5 persen).

Pendatang diuntungkan

Banyaknya caleg pendatang di suatu dapil, terutama dapil di wilayah timur, berhubungan dengan karakter masyarakat yang terbuka terhadap pen-

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum telah mencoret 174 warga negara asing atau WNA dengan kartu tanda penduduk elektronik dari daftar pemilih tetap Pemilu 2019. KPU RI pun menginstruksikan jajaran KPU di daerah untuk terus menyisir kemungkinan masih adanya WNA dengan KTP-el di DPT.

Anggota KPU, Viryan Aziz Kamis (7/3/2019), di Jakarta, menyampaikan, pihaknya mendapat laporan bahwa 11 KPU provinsi telah mencoret 73 WNA dari DPT. Jumlah itu di luar data 101 WNA dengan KTP-el yang diberikan Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya, Kemendagri mengungkap adanya 1.680 WNA dengan KTP-el, 101 WNA di antaranya ada dalam DPT.

Menurut Viryan, beranjak dari fakta lapangan dan juga untuk menjaga kepercayaan publik, KPU RI meminta KPU di daerah untuk terus menyisir dan langsung mencoret nama WNA dari DPT jika menemukannya. Selain itu, KPU juga membuka pos pelaporan WNA untuk menjangkau informasi mengenai hal yang sama.

Peneliti Perkulpmun untuk Pemilu dan Demokrasi Fadi Ramadhanil menyampaikan, jika ditilik dari aspek manajemen penyelenggaraan pemilu, masuknya WNA yang mempunyai KTP-el ke DPT merupakan pelanggaran administrasi. "Sebab, memasukkan orang dalam DPT itu, kan, sudah melalui proses cokolit (pencocokan dan penelitian). Makanya, penting segera dikoreksi agar tak dijadikan alat untuk menyakinkan pemilu ber-masalah," ujarnya. (INK)

>> TULISAN BERIKUTNYA:

Dapil dengan Pertumbuhan Tercepat dan Terlambat